

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana instrumen transfer fiskal di Indonesia memengaruhi ketimpangan antarwilayah, dengan menitikberatkan pada dampaknya di berbagai sektor ekonomi. Menggunakan data panel provinsi di Indonesia periode 2017–2023, studi ini menganalisis pengaruh lima mekanisme transfer fiskal terhadap disparitas ekonomi regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) secara signifikan meningkatkan ketimpangan antarwilayah secara keseluruhan, sebagaimana tercermin pada koefisien Gini. Dampak DBH bersifat heterogen antar sektor: DBH meningkatkan kontribusi sektor manufaktur dan pertambangan terhadap ketimpangan regional, namun pada saat yang sama menurunkan kontribusi sektor pertanian. Temuan ini mengindikasikan bahwa DBH turut membentuk ulang lanskap ekonomi Indonesia melalui pergeseran peran sektoral dalam pembentukan ketimpangan. Sementara itu, instrumen transfer fiskal lainnya (DAU, DAK, DID, dan DD) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap ketimpangan regional secara agregat maupun kontribusi sektoral terhadap ketimpangan. Rekomendasi kebijakan mencakup perancangan ulang mekanisme alokasi DBH untuk menekan dampaknya yang memperbesar ketimpangan, penguatan daya pemerataan DAU, serta penerapan intervensi yang lebih terarah.

Kata kunci: transfer fiskal, ketimpangan regional, ketimpangan sektoral, Indonesia, dana bagi hasil

ABSTRACT

This study examines how Indonesia's fiscal transfer instruments affect regional inequality, focusing on their impact across different economic sectors. Analyzing panel data from Indonesian provinces (2017-2023), the research investigates the effect of five fiscal transfer mechanisms, on regional economic disparities. The findings reveal that Revenue Sharing Fund (DBH) significantly increases overall regional inequality as measured by the Gini coefficient. The impact of DBH varies across economic sectors: it increases the contribution of manufacturing and mining sectors to regional inequality, while simultaneously reducing the contribution of agriculture sectors. This indicates that DBH is reshaping Indonesia's economic landscape. Other fiscal transfer instruments (DAU, DAK, DID, and DD) show no statistically significant effect on overall regional inequality or sectoral contributions to inequality.

Policy recommendations include redesigning the DBH allocation mechanism to reduce its inequality-enhancing effects, strengthening the equalizing power of DAU, and implementing targeted interventions.

Keywords: Fiscal transfers, regional inequality, sectoral inequality, Indonesia, revenue sharing.